IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

SONIA FERDIKA

NIM. 07011181823027

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

JULI 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Oleh:

Sonia Ferdika
07011181823027

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing 27 Mei 2022

Pembimbing I

Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP.196911191998032001

Pembimbing II

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.197603092008011009

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR"

Skripsi

Oleh :

SONIA FERDIKA
07011181823027

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 16 Juni 2022

Pembimbing :	Tanda Tangan
1 Ermanovida, S.Sos., M.Si NIP. 196911191998032001	----------
2 Junaidi, S.IP., M.Si NIP. 197603092008021009	----------

Penguji :	Tanda Tangan
1 Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si NIP. 196511171990031004	----------
2 Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si NIP. 197808182009121002	----------

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004	**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** NIP. 196911101994011001

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sonia Ferdika
Nim	: 07011181823027
Tempat Dan Tanggal Lahir	: Teluk-Lubuk, 16 September 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik dari Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 06 Juni 2022

Yang Membuat Surat Pernyataan

Sonia Ferdika

07011181823027

MOTO PERSEMBAHAN

“Satu-satunya kebebasan yang pantas disebut adalah kebebasan untuk mengejar kebaikan diri sendiri, dengan cara terbaik, sepanjang kita tidak berupaya untuk menyingkirkan orang lain dari haknya atau menghambat upaya mereka untuk mendapatkannya”

-John Stuart Mill

Atas izin Allah SWT,

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. **Diri saya sendiri, yang sudah bisa berjuang dan bertahapn sampai di sejauh ini.**
2. **Kedua orang tua, Bapak Nasrudin Dan Ibu Rusmini Serta Keluarga Saya tercinta**
3. **Kedua dosen pembimbing saya, Ermanovida, S.Sos., M.Si dan Junaidi, S.IP., M.Si**
4. **Sahabat terbaik saya**
5. **Teman-Teman Administrasi Publik Angkatan 2018**
6. **Almamater Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Penelitian Ini Berjudul Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini di latar belakangi dari adanya kewajiban semua pegawai untuk menggunakan aplikasi SI-EKA dalam membuat laporan kinerja, namun fakta dilapangan masih ditemukan beberapa pegawai belum memahami terkait penggunaan aplikasi ini sehingga pegawai terlambat dalam mengumpulkan berkas laporan kinerjaserta masih ditemukan pegawai yang mengisi laporan harian secara manual. Tujuan Penelitian iniyaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E- Government* Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir terkhususnya pada aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI (SI-EKA). Adapun Penelitian ini menggunakan teori dari George C Edward III dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan data penelitian bersumber dari informan, dokumentasi, studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu teknik *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan *E-Government* terkait aplikasi SI-EKA Pada PNS di Kementerian AgamaKabupaten Ogan Ilir ini dinilai belum terlaksana dengan baik hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yaitu, masih kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi, implementor yang melaksanakan kebijakan belum pada aturannya serta kurang efektifnya penyampaian informasi melalui *Group WhattsaApp*. Serta belum ada SOP yangmengatur dalam menjalankan aplikasi ini. saran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian ini yaitu memberikan teguran kepada aktor pelaksana, dengan melakukan rapat evaluasi secara langsung, mengadakan sosialisasi kepada semua pegawai yang belum memahami SI-EKA seperti pelatihan secara langsung, menyebar pamflet yang mudah di pahami oleh pegawai dimedia sosial,dan membuat SOP sebagai pedoman bagi implementor dalam melaksanakan kebijakanya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *E-Government*, Aplikasi SI-EKA

Pembimbing I	Pembimbing II
Ermanovida, S.Sos, M.SI	**Junaidi, S.IP., M.Si**
NIP.196911191998031001	**NIP. 197603092008021009**

Indralaya, Juli 2022

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Scanned with CamScanner

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of E-Government Policy on Civil Servants (PNS) at the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency. This research is in the background of the obligation of all employees to use the SI-EKA application in making performance reports, but the facts in the field are still found some employees related to the use of the application, so that employees are late in collecting performance reports and find employees who fill out daily reports manually. The purpose of this study was to find out how the implementation of E-Government Policy for Civil Servants (PNS) at the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency, especially in the application of the ASN Performance Electronic Information System of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (SI-EKA). This study uses the theory of George C Edward III with the dimensions of communication, resources, disposition and structure of employees. The research method used is descriptive qualitative and research data sourced from informants, documentation, literature studies and legislation. The technique used in determining the information is purposive sampling technique with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the implementation of E-Government policies related to the SI-EKA application for civil servants at the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency was considered ineffective, this was caused by several factors that influenced it. Namely, there is still a lack of socialization regarding the use of applications, implementers who have not implemented policies on the rules, and the ineffectiveness of delivering information through WhatsApp Groups. And there is no SOP that regulates running this application. The suggestions recommended by the author for this research are to give warnings to implementing actors, by conducting direct evaluations, conducting outreach to all employees who do not understand SI-EKA such as directly, distributing pamphlets that are easily understood by employees on social media, and making SOPs as guidelines. for implementers in implementing their policies.

Keywords: Policy Implementation, *E-Government*, SI-EKA Application

Advisor I

Ermanovida, S.Sos, M.SI
NIP.197603092008021009

Advisor II

Junaidi, S.IP., M.Si
NIP.196911191998032001

Indralaya Juli 2022
Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social Science And Political Science
Sriwijaya Univercity

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat allah SWT. Karena berkat rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Srata Satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Sriwijaya. Dengan adanya skripsi ini penulis memiliki harapan agar bisa berguna bagi pembaca terkhususnya civitas akademika dan Masyarakat luas. penulis menerima segala kritik, saran maupun usulan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. dan penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terma kasih dan penghargaanya kepada

1. Allah SWT yang sudah senantiasa memberikan nikmat keberkahan di setiap prosesnya
2. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi pertama dan juga merupakan dosen pembimbing kuliah kerja administrasi (KKA) yang sudah memberikan kesempatan waktu dan ilmu untuk membimbing dalam memberikan arahan dan masukannya selama dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Junaidi, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbinga skripsi kedua yang sudah meluangkan waktu dalam untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukannya selama dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, bapak Nasrudin Dan Ibu Rusmini serta keempat saudara kandungku yaitu Muhammad Khadafi, Ika Sapitri, Fika Loka Dan Shelpi Chandriani yang tidak pernah berhenti untuk memberikan dukungan terbaik, moril dan materil kepada diriku selama diperkuliahan. Terima kasih banyak atas semua do'a yang selalu dipanjatkan untuk diberikan keberkahan dalam setiap prosesnya.
7. Bapak H.M. Kholil Azmi, S.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
8. Ibu Agustini Syahputri, S.IP selaku Staff Subbagian Tata Usaha di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
9. Semua Kepala Seksi dan pegawai disetiap bidangnya Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang membantu penulis dalam memberikan kebutuhan data yang di lakukan peneliti.
10. Kakak tingkat Jurusan Ilmu Administrasi Publik Marcellinus Adi Prayoga, Felisa, Nevsia Carlina, Nuraini dll yang sudah membantu dalam memberikan saran dan masukannya selama penyusunan skripsi ini
11. Sahabat ku, Sania Fatricia, Ummi Mardhotillah, Liza Fitria Syar Sella Dan Yogi Dwi Putra yang menjadi *suport system* terbaik selama perkuliahan dalam melewati berbagai rintangan dan pengalaman yang terbaik selama perjalanan.
12. *Family Pegagan* yang memberikan tempat terbaik, sarana dan fasilitas yang mendukung penulis selama perkuliahan.

13. Kepada orang-orang baik yang tuhan berikan kepada penulis dalam menyelesaikan semua tantangan ini
14. Badan Otonom Cogito, Young Entrepreneur Sriwijaya (YES), Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, IMMETA, PMKB dan YAKESMA yang sudah mengajarkan banyak hal tentang kepemimpinan, tanggung jawab, loyalitas dan kontribusi.

Semoga allah SWT, selalu memberikan limpahan karunia dan rahmat serta hidayahnya atas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis sampai saat ini. atas segala perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya Juli 2022
Penulis

Sonia Ferdika

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
MOTO PERSEMBAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah., ... 14
C Tujuan 14
D. Manfaat 14
BAB II **16**
TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Landasan Teori 16
B. Kebijakan Publik 16
D. Teori implementasi kebijakan. 20
a. Teori Implementasi Van Meter Van Horn 21
b. Teori Implementasi Merille S. Grindle 21
c. Teori Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 22
d. Teori Implementasi George C Edward III 22
E. E-Government 27
F. Definisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 29
H. Teori Implementasi Yang Digunakan 32
I. Penelitian Terdahulu 35
J. Kerangka pemikiran 41
BAB III **43**
METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian 43
B. Definisi Konsep 43
C. Fokus Penelitian 44
D. Jenis Dan Sumber Data 46
E. Informan 47
F. Teknik Pengumpulan Data. 48
G. Teknik Analisis Data 49
H. Sistematika Penelitian 50
BAB IV 55
PEMBAHASAN 55
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 55
a. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 55
b. Deskripsi Informan 60
c. Aplikasi Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama 61
(SI-EKA) **61**
B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Aplikasi SI-EKA 63
Pada PNS Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 63
1. Komunikasi 64
2. Sumber Daya 72
3. Disposisi 82
4. Struktur Birokrasi 85
C. Pembahasan 91
BAB V 95
PENUTUP, ... 95
A. Kesimpulan, ... 95
B. Saran, ... 96
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN - LAMPIRAN 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuan SDGs 2
Gambar 2. Tampilan Aplikasi SI-EKAGambar 2. Tampilan Aplikasi SI-EKA 8
Gambar 3. Bagan Implementasi Kebijakan Dari George C Edward III 27
Gambar 4. Kerangka Pemikiran 41
Gambar 5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 55
Gambar 6. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 60
Gambar 7. Group WhattsApp Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 65
Gambar 8. Terkait Sosialisasi Tentang Penggunaan Aplikasi SI-EKA Tahun 2019 66
Gambar 9. Buku panduan aplikasi SI-EKA 68
Gambar 10. Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi SI-EKA.....68
Gambar 11. Wawancara Dengan Pengguna Aplikasi SI-EKA.....69
Gambar 12. Terkait Pegawai Yang Lupa Dengan SI-EKA Pada Group WhattsApp.....70
Gambar 13. Wawancara Dengan Admin Aplikasi SI-EKA 71
Gambar 14. Wawancara Dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Ogan 73
Gambar 15. Terkait Tugas Implementor Dalam Memonitoring Pegawai Di SI-EKA.....75
Gambar 16. Wawancara Dengan Kepala Kantor Kementerian Agama 75
Gambar 17. Wawancara Dengan Kepala Seksi Dibagian Bimbingan Masyarakat Islam 76
Gambar 18. Wawancara Dengan Kepala Seksi Bidang Pendidikan Madrasah.....77
Gambar 19. Laporan Kinerja Pegawai Manual 79
Gambar 20. Surat Edaran Menteri Agama Terkait SI-EKA.....84

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Tugasnya.....7
Table 2. Terkait Pengumpulan Manual Laporan Bulanan Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....9
Table 3. Penelitian Terdahulu.....36
Table 4. Fokus Penelitian 45
Table 5. Jumlah Sarana Dan Prasarana Di Bidang Kepegawaian 81
Table 6. Hasil Dan Temuan Penelitian.....88
Table 7. Matriks Kesimpulan Penelitian 101

DAFTAR SINGKATAN

BIMAS	: Bimbingan Masyarakat Islam
IT	: Technology Information
KASI	: Kepala Seksi
Kasubag	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
MDGs	: Milenium Development Goals
PAKIS	: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam
PENMAD	: Pendidikan Madrasah
PHU	: Penyelenggara Haji Dan Umroh
SDGs	: Suistainble Development Goals
SI-EKA	: Sistem Informasi Elektronik Kinerja Asn Ri
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKP	: Sasaran Kerja Pegawai
SOP	: Standar Operasional Procedures
TUKIN	: Tunjangan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suistainable Development Goals (SDGs) atau disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kesehjateraan manusia secara mendunia dalam memberikan peran yang setara di seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Dengan berbagai program pembangunan secara global atau internasional dilakukan sampai pada tahun 2030. SDGs ini pada dasarnya merupakan program lanjutan dari Millenium Development (MDGs) yang sudah berakhir di tahun 2015 dengan target utamanya yaitu mencapai kesehjateraan dan pembangunan masyarakat. Namun dari pada itu semenjak berakhirnya Millenium Development (MDGs), untuk melanjutkan pembangunan di resmikan lah sebuah deklarasi Suistainable developmen goals (SDGs) Melalui sidang yang di sepakati pada bulan September 2015 terdapat 17 tujuan pembangunan global dengan 169 target dan menggunakan 241 indikator (Yuni Mogot, 2021:3). Kata kunci utama dari Suistainable developmen goals (SDGs) yaitu kesadaran akan kebutuhan masyarakat miskin di negara berkembang serta adanya keterbatasan teknologi dan organisasi sosial kapasitas lingkungan yang tercukupi pada generasi sekarang dan dimasa yang akan datang hal tersebut menjadikan setiap negara berkembang untuk terus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan.

Gambar 1. Tujuan SDGs

Sumber: bappenas, www.sdgs.bappenas.go.id

Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari anggota PBB, yang memiliki komitmen dalam mendukung program SDGs tersebut. Sehingga lahirnya Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs tindakan lanjutan. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2017:75). Dibentuk dari tim koordinasi nasional SDGS yang berkerjasama dengan menteri perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS). Yang kemudian selain menetapkan tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang peraturan ini juga akan memenuhi target yang sudah di setujui sampai tahun 2030.

Salah satu isi dari 17 tujuan SDGs ini yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh terdapat pada point ke 16. Yang berisi upaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai *(Peace*), terwujudnya penegakan keadilan *(Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun intitusi yang tangguh (*Strong Intitusions*). Sehingga dalam mencapai tujuan ini setiap negara diharapkan dapat mengaturnya sesuai dengan kebijakanya masing-masing. SDGs ini tidak di serta merta berdiri sendiri, terdapat kesepakatan-kesepakatan lain yang arah dan dapat menjadi penopang dalam kebijakan.

pembangunan berkelanjutan ini. salah satunya pemerintah memiliki keterlibatan penting dalam membantu mewujudkan *Good Governance.*

Secara umum *Good Governance* merupakan "Pemerintahan yang baik". Menurut (World Bank, 1989) Wold Bank sebagai pencetus konsep ini mengartikan bahwa *Good governance* merupakan proses pengambilan pencapaian keputusan. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara. dalam Ubadillah, Ermadiani (2021:2) ada beberapa prinsip *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) 1997 yaitu:

1. Partisipasi
2. Kepastian Hukum
3. Transparansi
4. Tanggung Jawab
5. Berorientasi Kepada Kesepakatan
6. Keadilan
7. Efektivitas Dan Efesiensi
8. Akuntabilitas
9. visi strategik.

Prinsip tesebut tentunya menjadi landasan bagi indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Akuntabilitas, Efesiensi dan efektivitas pemerintah sangat di butuhkan pada era sekarang Sehingga dari pengembangan tersebut muncul sebuah konsep *E-Government* yang memiliki definisi yaitu kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayangan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun (2003).

Tentang Pengembangan *E-Government* berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi infomasi dan komunikasi dalam meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan hubungan antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lainnya. Sehingga Teknologi tersebut termasuk e-mail. *WAN (Wide Area Net- work)*, Internet, peralatan mobile computing (Laptop, *SmartPhone*, PDA) dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dan memberi pelayangan elektronik dalam berbagai bentuk. Dari tiga model *E-Government* tersebut, dipilih satu *E-Government* yang berhubungan dengan pemerintah dan instansi pemerintah. Sehingga hal tersebut dapat didefinisikan sebagai *E-Government* merupakan sistem manajemen informasi dan layangan kepada pegawai di sektor pemerintah dalam melihat kinerja yang dilakukan diberbagai institusi, lembaga maupun kementerian.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien,transparans serta akuntabel untuk pelayangan publik, di masa sekarang yang serba modern teknologi perkembangan pesat sesuai tuntutan zaman, sehingga pemerintah berupaya untuk beradaptasi di situasi sekarang, karena jika tidak maka akan banyak ketertinggalan teknologi yang pada akhirnya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup pemerintah, sehingga Pada tahun 2018, lahirlah sebuah Peraturan Presiden Dengan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki arti yaitu penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayangan kepada setiap pengguna elektronik, masyarakat, pegawai maupun antar instansi pemerintah yang memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas pelayangan publik serta kinerja pegawai dalam menyelenggarakan proses administrasi pemerintahan.

Menurut Buku Kementerian PPN/ Bappenas, (2020:50) Dalam mewujudkan institusi yang tangguh tentunya ada aspek terpenting yang mampu mendorong secara internal perubahan tersebut. Pokok utama menjadi sasaran adalah keterlibatan sumber daya yang menjadi pendukung untuk mewujudkan institusi tangguh. Sumber daya yang dimaksud yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja di instansi pemerintahan, pengawasan dan koordinasi tentunya di lakukan dalam melihat kinerja yang sudah di lakukan. Karena adanya kinerja pegawai akan berpengaruh pada kualitas tugas yang dihasilkan. Namun dari pada itu untuk memberikan membaharuan serta memperbaiki kinerja pegawai diperlukan untuk mereformasi birokrasi.

Ketika menjalankan roda pemerintahan birokrasi tentunya setiap instansi diharapkan mampu melihat kinerja pegawai dalam bekerja, tidak terkecuali pada Kementerian Agama Indonesia. Pada tahun 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah inovasi baru dari teknologi komunikasi dan informasi semacam aplikasi yang memudahkan pimpinan/atasan untuk melihat kinerja pegawainya yaitu aplikasi SI-EKA (Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penilaian kerja para pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Aplikasi SI-EKA ini mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: B-03425/SJ./BII/2-bkp.04.1/2/2019 tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama, lahirnya kebijakan aplikasi SI-EKA ini didasari oleh Surat Edaran Menteria Agama Nomor:16591/SJ.II/B.2/04/2018 Tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pergawai Berbasis Elektronik (2019:1) Kedalam aplikasi SI-EKA.. Adanya surat edaran tersebut mewajibkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membuat laporan kinerja harian (LHK) sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dibuat berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, SI-EKA juga menjadi alat bantu dalam penghitungan pemberian

tunjangan kinerja pegawai sehingga menjadi satu kesatuan sebagai syarat dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai. Hal tersebut diberikan Sebagai salah satu *reward* yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan motivasi yang lebih bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam mengimplementasikan surat edaran tersebut yang mengharuskan setiap pegawai untuk membuat laporan harian kinerja (LHK) secara manual di tulis dalam sebuah kertas sehingga ketika terjadi pengumpulan berkas di setiap bulannya oleh semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap Kantor Kementerian maka akan terjadi penumpukan berkas, tidak efisien tempat sehingga tidak menutup kemungkinan berkas yang kumpulkan ada yang hilang atau rusak. Yang kemudian pemerintah memberikan kemudahan pembuatan laporan tersebut dengan memanfaatkan teknologi secara digital. Kemudian dengan adanya aplikasi SI-EKA pada Kementerian Agama diharapkan adanya perubahan budaya kerja pegawai yang lebih modern dengan penggunaan teknologi selama proses kerja sehingga pembaharuan ini dapat menjadi kemudahan dalam mewujudkan *E-Government* untuk pemerintahan yang lebih baik lagi.

Perubahan kerja yang semula manual menjadi digital, menjadikan setiap daerah membutuhkan waktu untuk bisa memahaminya sehingga menjadi tuntutan bagi setiap Kementerian Agama beradaptasi dalam setiap perubahan teknologi yang ada sehingga dapat menerapkan *E-Government* di lingkup kerja. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah menjadikan setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus segala kebutuhan rumah tangganya. Terkhususnya dilingkup Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan instansi vertikal Kementerian Agama tingkat pusat dengan memiliki tugas sesuai cangkupan wilayah dilengkapi dengan persebaran Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan pokok yang sesuai dengan aturan diberikan oleh Kementerian Pusat.

Di kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir aplikasi SI-EKA mulai berjalan pada awal tahun 2018, hal tersebut menjadi menarik karena nyatanya masih banyak kantor Kementerian Agama di kota-kota yang lebih besar belum menggunakan SI-EKA ini, seperti kementerian Agama Bone Bolango Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan bimbingan teknologi terkait penggunaan aplikasi SI-EKA pada tahun 2021 melalui sumber berita: https://kemenag-bonebolango.info/kemenag-bone-bolango-gelar-bimtek-penggunaan-aplikasi-SI-EKA/.

Dalam implementasi aplikasi SI-EKA di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tercatat 315 akun pegawai yang sudah terdaftar dan memiliki akun pada aplikasi dengan berdasarkan data berikut ini:

Table 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tempat Tugasnya

NO	**UNSUR**	**JUMLAH PEGAWAI**
1.	Kantor	48
2.	KUA	44
3.	MAN	40
4.	MTsN 1	40
5.	MTsN 2	30
6.	MTsN 3	5
7.	MIN 1	23
8.	MAS	11
9.	MTSS	25
10.	MIS	25
11.	RA	4
12.	SLTA	2
13.	SLTPN	7
14.	SDN	10
15.	SLTPS	1
Total		**315**

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa terdapat 315 pegawai di Kementerian Agama

dengan memiliki tanggung jawab dan pembagian tugas yang berbeda Jumlah pegawai terbanyak dimiliki dari unsur Kantor Urusan agama yang tersebar di berbagai Kabupaten Ogan Ilir, dengan jumlah seimbang di dapat oleh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan yang paling sedikit jumlah pegawai yaitu berada pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta (SLTP) sebanyak 1 pegawai. Hal tersebut tentunya memiliki perbedaan jumlah pegawai yang tersebar di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

Gambar 2. Tampilan Aplikasi SI-EKAGambar 2. Tampilan Aplikasi SI-EKA

Sumber: Buku Panduan Aplikasi SI-EKA Kementerian Agama RI 2018

Gambar di atas merupakan tampilan awal aplikasi SI-EKA ketika sudah memiliki akun, tahap selanjutnya yaitu pegawai diwajibkan melengkapi profil diri yang berisi sejumlah data pegawai. Ketika sudah menyelesaikan itu maka tahap selanjutnya pegawai akan menggunakan aplikasi tersebut dengan mengisi bagian dari laporan kegiatan harian pada bagian bawah susunan kegiatan tersebut. Meskipun aplikasi SI-EKA menjadi wujud dari penerapan pembaharuan teknologi dan informasi yang memberikan banyak kemudahan dan otomatisasi pembuatan laporan kinerja harian faktanya dilapangan peneliti menemukan berbagai permasalahn, baik secara internal maupun eksternal sehingga dapat di kelompokan dua masalah utama yang menjadi kedala dalam implementasi aplikasi SI-EKA

1. Kurangnya pemahaman pegawai dalam pengeloaan data pada aplikasi SI-EKA. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi dalam hal pengimputan serta memperbaharui data. Kemudian dari segi sumber daya manusianya sendiri kurang memiliki minat belajar untuk menggunakan aplikasi ini.

Table 2. Terkait Pengumpulan Manual Laporan Bulanan Pegawai Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

No	**Jumlah Pegawai**	**Jumlah Yang Mengumpulkan Berkas**	**Bidang**	**Tanggal Pengumpulan**			**Keterangan**
				Bulan Januari	**Bulan Juni**	**Bulan Oktober**	
1.	1	1	Kepala Kantor	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
2.	10	10	Sub Bagian Kepegawaian	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
3.	5	5	PENMAD	05, Februari 2021	07, Juli 2021	06, November 2021	Terlambat
4.	3	3	PAKIS	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
5.	3	3	PHU	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
6.	6	6	BIMAS	06, Februari 2021	05, Juli 2021	06, November 2021	Terlambat
7.	9	9	Pengawas Penghulu.	06, Februari 2021	07, Juli 2021	06, November 2021	Terlambat
8.	2	2	Penyelenggara Katolik	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
9.	1	1	Penyelenggara Hindu Dan Buddha	05, Februari 2021	05, Juli 2021	05, November 2021	Tepat waktu
10	8	8	Guru-Guru	05, Februari 2021	07, Juli 2021	06, November 2021	Terlambat
total	48	48					

Sumber: Data diolah oleh penulis dari Bidang Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir 2021

Dari tabel diatas menunjukan bahwa laporan diberikan kepada admin SI-EKA dilakukan secara manual berdasarkan hasil laporan kinerja selama satu bulan penuh. Dari total pegawai

yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 48 orang yang mengumpulkan juga dengan jumlah yang sama namun data memperlihatkan bahwa waktu pengumpulan yang seharusnya dilakukan batas waktu di tanggal lima awal bulan namun ada beberapa pegawai di berbagai bidang mengumpulkan secara terlambat dari waktu yang ditentukan. Adapun bidang yang terlambat mengumpulkan laporan kinerja bulanan yaitu pada bidang Penmad, Bimas, Pengawas Penghulu Dan Guru-Guru hal tersebut berdampak pada ketertundaan dalam melakukan pencairan tunjangan kinerja. untuk melihat jumlah pegawai yang mengumpulkan setiap bulannya melalui aplikasi elektronik admin tidak bisa melakukannya karena adanya perubahan dari pusat yang saat menjadi kendala. Berdasarkan hasil wawawancara dengan admin SI-EKA mengatakan bahwa:

> "tahun kemarin bisa di lihat siapa saja yang mengisi laporan kinerja di aplikasi SI-EKA namun saat in tidak bisa hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dari Kementerian Agama Pusat, namun untuk melihat secara langsung atau manual bisa, melalui laporan kinerja bulanan manual yang sudah di print oleh setiap pegawai pada saat melakukan pencairan tunjangan kinerja, jumlah pegawai yang mengumpulkan sudah lengkap berdasarkan hasil laporan kinerja secara keseluruhan, namun sering kali terjadinya keterlambatan dalam mengumpulkan laporan padahal sudah ada tenggat waktu yang kami berikan, biasanya keterlambatan itu disebabkan karena masih ada pegawai yang kurang memahami dalam membuat laporan kinerja bulanan di SI-EKA . (Wawancara 14 April 2022)

Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan tabel dapat disimpulkan bahwasanya untuk melihat secara langsung di aplikasi jumlah yang mengumpulkan laporan kinerja bulanan tidak bisa diketahui karena perubahan aturan dari Kementerian Agama Pusat dan jika dilihat dari hasil laporan kinerja dalam bentuk hardfile menunjukan bahwa adanya kesesuaian antara jumlah pegawai dengan pengumpulan laporan. Namun masih ada pegawai di bidang-bidang yang terlambat dalam mengumpulkan laporan kinerja. keterlambatan tersebut didasarkan dari kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi SI-EKA.

2. Keterlambatan pengumpulan berkas laporan kinerja harian untuk pencairan program tunjangan kinerja. Berdasarkan informasi yang di peroleh pada saat wawancara langsung dengan pelaksana kebijakan tunjangan kinerja pada bagian kepegawaian

> "Adanya keterlambatan dalam pengumpulan berkas laporan kinerja bulanan pegawai di berbagai satuan kerja sehingga mengalami kerterlambatan juga dalam proses pencairan tunjangan kinerja padahal itu menjadi syarat utama". (Wawancara 15 Februari 2022)

Artinya bahwa dalam proses pelaksanaan pencairan tujangan kinerja sering kali adanya temuan terkait keterlambatan dalam mengumpulkan berkas laporan yang disebabkan oleh faktor internal serta eksternal. Dilihat dari internal seperti pegawai kantor di setiap bidang dalam mengelolaa, mengisi serta melakukan pembaharuan data pada aplikasi SI-EKA di menjelang akhir batas waktu yang ditentukan admin dan ditemukan juga rendahnya kualitas sinyal yang menyebabkan kesulitan dalam mengisi aplikasi SI-EKA tersebut.

3. Masih ditemukan pegawai yang Mengisi laporan kinerja bulanan menggunakan cara manual.

Pada pelakasanaannya pegawai cenderung tidak menggunakan aplikasi SI-EKA untuk mengisi laporan harian dan hanya mengguunakan cara manual yaitu mencatat di kertas biasa dan kemudian baru di rekap ketika akhir bulan, artinya bahwa hal tersebut jika ditinjau dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16591/SJ.II/B.2/04/2018 Tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pergawai Berbasis Elektronik nyatanya peraturan tersebut sepenuhnya memiliki kondisi yang berbeda dilapangan sehingga hal ini menunjukan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan *E-Government* pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Melalui riset yang dilakukan oleh penelitian terdahulu oleh Ameri (2021:4) dengan fokus penelitiannya yaitu penerapan aplikasi SI-EKA di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukan bahwa melalui tiga indikator keberhasilan dalam implementasi dengan ukuran yaitu dukungan, kemampuan dan nilai bahwa penerapan E-Kinerja masih memiliki kendala hal tersebut pada

sumber daya yang kurang dalam bidang teknologi informasi. Namun disisi lain adanya aplikasi SI-EKA memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai, hasil penelitian tersebut di lakukan oleh Renald Christo Lembong, Samparan Lukman, Udaya Madjid (2021:8) dengan fokus penelitian efektifitas kerja dan pelaksanaana E-Kinerja pada lokasi penelitian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang cukup sama di lakukan oleh Muflihun Waliulu, Sampara Lukman dan Kusworo (2021:2) dengan judul penelitian efektivitas penerapan E-Kinerja dalam meningkatkan kinerja dengan fokus penelitian efektivitas kinerja, penerapan dan penilaian aplikasi namun yang cukup memberdakan penelitian ini dari Renald Christo Lembong, Samparan Lukman, Udaya Madjid (2021:8) yaitu berbeda pada letak daerah yang diteliti yaitu di Provinsi Maluku. Adapun fokus penelitian yang sama terkait penerapan aplikasi E-Kinerja dan efektifitas kerja yang dilakukan oleh Indra Rukmana, Rita Rahmawati Dan Euis Salbiah (2020:2) pada instansi pusat pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui 66 responden menunjukan bahwa aplikasi E-Kinerja dinyatakan sukses untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika tadi fokus penelitian pada efektifitas penerapan kinerja, maka di penelitian dari Dwi Rafita, Sri Wahyu Dan Lilik Farida (2019:3) yang fokus penelitiannya pada prestasi kerja pegawai menunjukan bahwa penerapan E-Kinerja ini berpengaruh positif terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatn Sipil Di Kabupaten Banyuwangi.Kemudian dengan fokus penelitian yang sama dilakukan oleh Muhammad Justiawal (2020:4) dengan lokasi penelitian pada Kabupaten Wajo dan peneliti dilakukan oleh Dhany Wahyu Pratama,Tri Murwaningsi Dan Anton (2020:3), dalam fokus penelitian implementasi E-Kinerja yang sama di tetapi tempat lokasi berbeda, disini peneliti mengunakan lokasi pada Kota Surakarta. Dalam

hal pengaruh beberapa peneliti menguji pengaruh penerapan E-Kinerja terhadap integritas yang dilakukan oleh peneliti Sisi Wahyuni (2020:2) dengan menggunakan metode kuantitatif menunjukan bahwa adanya pengaruh variabel E-Kinerja (X1) terhadap kinerja pegawai (Y) dengan hasil Adjust Square 0,384. Dan terdapatnya pengaruh yang signifikan variabel integritas (X2) terhadap kinerja (Y) dengan nilai *Adjust R Square* sebesar 0,269. Dengan lokasi penelitian Kota Payukumbuh.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Ema Nurhayati (2017:3) dengan melihat pengaruh penerapan E-Kinerja terhadap pegawai yang fokus penelitiannya pada motivasi pagawai hal tersebut menunjukan bahwa pegawai pada Kecamatann Semarang Timur. Melalui variabel yang dominan mempengaruhi kinerja pegawai adalah variabel dari penerapan E-Kinerja yang secara langsung mempengaruhi motivasi berkerja. Salah satu pentingnya implementasi E-Kinerja yaitu sebagai syarat untuk membuat laporan sehingga pegawai bisa mendapatkan sebuah tunjangan kinerja, hal tersebut sudah di teliti oleh Farida Aryangi, Iskandar Zulkarnain (2021:13) dengan fokus penelitian implementasi program tunjangan kinerja dan kinerja pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. Terakhir dalam menguji tingkat kesuksesan implementasi E-Kinerja dengan menggunakan model *DeLoner-McLearn* sebagai fokus peneltian menunjukan bahwa aplikasi ini dapat di gunakan untuk meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) namun masih terdapat perbaikan pada kualitas sistem informasi dan penggunaannya.

Dapat disimpulkan bahwa hal mendasar yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian lainya yaitu implementasi terhadap aplikasi yang digunakan jika E-Kinerja menjadi tolak ukur dalam melihat kinerja pemerintahan, maka Kementerian Agama memiliki aplikasi tersendiri untuk melihat implementasi kebijakan *E-Government* terkhususnya pada aplikasi

yaitu Sistem Informasi Elektronik Kinerja Aparatur Sipil Negara (SI-EKA) yang memiliki fungsi untuk mencatat laporan kinerja harian,bulanan serta tahunan. Hal yang membedakan kemudian terletak pada teori yang digunakan disini peneliti akan menggunakan teori Edward III karena dilihat dari permasalahan yang terjadi di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan kebutuhan variabel yang sudah ditentukan.

Berbeda hal nya dengan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter Dan Van Horn dengan melihat berbagai aspek yang diperlukan sesuai melalui kondisinya. Dan terakhir dari lokasi penelitian, sampai saat ini belum ada yang meneliti tentang implementasi kebijakan *E-Government* pada Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dengan fokus penelitian yaitu implementasi aplikasi dari SI-EKA. Sehinga dilihat dari permasalahan yang terjadi di lapangan menjadikan peneliti tertarik mendalami lebih lanjut faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan *E-Government* di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

B. Rumusan Masalah

Melalui fenomena yang terjadi maka dapat di rumuskan permasalahan menjadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E-Government* aplikasi SI-EKA Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E-Government* aplikasi SI-EKA Pada PegawaI Negeri Sipil (PNS) Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat

Berikut manfaat adanya penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan administrasi publik dan menjadi referensi penelitian bagi mahasiswa/mahasiswi lainya serta melakukan penelitian yang memiliki terkaitan dengan Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.
b. Secara teoritik, memberikan saran atau masukan bagi para pemangku kepentingan, terkhususnya dalam hal implementasi dilapangan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E-Government* Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir .

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

Kementerian Agama. (2018). *Panduan Aplikasi SI-EKA* (1st ed.). Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama. (2019). *Surat Edaran Nomor B-03425/S1./B.II/2-bkp.04.01/2/2019 Tentang Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama*.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik* (Vol. 1).

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*.

Buku

Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. In *Alfa Beta*.

Abdoellah, A. Y. Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung* . Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. In Anto (Ed.), *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). Media Citra Mandiri Press.

Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif* . Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses,Analisis,dan Partisipasi*.Jakarta. Ghalia Indonesia.

Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (H. T. Nurfandi; (ed.); 1st ed.). ALFABETA,cv.

Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik Di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Pelajar.

Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.

Santosa, P. (2009). *Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Semiawan, C. r. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Gransindo

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik :Teori,Proses Dan Studi Kasus* (Ke-2 Edisi). CAPS.

Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyangto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan *E-Government* di Provinsi Sumatera Barat. In *E-Government*.

Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola* (E. C. B. Vivi Yulaswati, dkk. Kedeputian Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kemennterian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, D. S., & M. Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In Ayup (Ed.), *Dasar*

Metodologi Penelitian. Bandung. Literasi Media Publishing.

Yuniningsih, T. (2019). Kajian Birokrasi. In R. Ciptaningsih (Ed.), *Definisi Mnajemen* (1st ed.). FISIP Administrasi Publik press UNDIP.

Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses,Analisis,dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed.); 1st ed.). Ghalia Indonesia.

Jurnal.

Muflihun Waliulu, Sampara Lukman, & Kusworo. (2021). Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *12*(4), 1–10. https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.342

Mukti, D. R., Lelly Hana Setyangti, S. W., & Farida, L. (2019). Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis E-Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *6*(2), 175. https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11166

Renald Christo Lembong, Sampara Lukman, U. M. (2021). Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *12*(4), 1–9. https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.342

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayangan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817

Wahyuni, S. (2020). Pengaruh Penerapan E-Kinerja Dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, *4*(2), 153. https://doi.org/10.24036/jess.v4i2.290

Adetriartna, O. (2018). *Implementasi Program Jalin Matra Dalam*. universitas Brawijaya. **Error! Hyperlink reference not valid.**

Yuni Mogot, H. (2021). *Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pada Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Provinsi Papua*. 5(59) Https://Doi.10.34010/COMMON.V5I1.5122

Ameri. (2021). *Analisis Penerapan E-Government Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kantor Kementerian Agama* Kabupaten *Kuantan Singingi*. *2*, 2942. Https//Doi.10.29259/Jmbt.V18i2.14616

Aryangi, F. (2021). *Implementasi Kinerja Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon*. 1–14. DOI: http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v6i1.6021

Habibullah, A. (2010). Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan *E-Government*. *Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan E-Government*, *23*(3), 187–195. DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.33164/Iptekkom.19.1.2017.51-62

Indra Rukmana, Rita Rahmawati, E. S., Pusat. (2020). Efektivitas Penilaian Kinerja Berbasis E-Kinerja Effectiveness of Performance Assessment Based on E-Performance in Centre of Agricultural. *Gover*, *6*(April), 1–6. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2633

Justiawal, M. (2020). *Analisis Tingkat Kinerja Pegawai Berbasis Aplikasi*. *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.24036/jess.v4i2.290

Nurhayati, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 79–91. DOI: 10.33633/jpeb.v2i2.2274

Ubaidillah, Ermadiani, A. (2021). *Penerapan E-Planing Di Kota Palembang*. *18*(1), 1–14 P-ISSN : 0216-6836 Doi.10.29259/jmbt.v18i2.14384

Internet:

https://kemenag-bonebolango.info/kemenag-bone-bolango-gelar-bimtek-penggunaan-aplikasi-SI-EKA/. (Diakses 13 Februari 2022, Pukul 13.30)